

ANALISIS SITUASI DAMPAK DESENTRALISASI PENDIDIKAN PADA KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA

Suharsimi Arikunto *)

Abstract

This paper is primarily intended to further examine the performance of District Education Office and cities after the implementation of regional autonomy. Role Diknas County / city becomes larger. Duties and functions of this office is to determine the 'fate' education in their area. With the duties and functions of school as the education provider directly, then the District Education office/town is the manager or coordinator of educational institutions in the area concerned.

Key words: *analysis of effects circumstances, decentralization of education*

A. Pendahuluan

Setiap perubahan, khususnya perubahan dalam kebijakan nasional, pasti ada dampak yang mengiringinya. Demikian pula dengan perubahan kebijakan pemerintahan yang semula berbentuk sentralisasi menjadi desentralisasi. Pengalaman internasional menunjukkan adanya hasil positif dari desentralisasi, yang teramati sekurang-kurangnya dalam empat hal, yaitu : (1) meningkatkan mutu pendidikan (2) mempertinggi tingkat efisiensi bidang administrasi (3) membuat biaya pendidikan lebih hemat, dan (4) berdampak pada kesetaraan pada pendidikan.

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, sekaligus menarik kepedulian pemerintah daerah untuk lebih ikut memikirkan pengembangan pendidikan. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh penganjur desentralisasi pendidikan, mutu pembelajaran akan meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa apabila ada hubungan yang erat antara pengelola dengan pelaksana. Realisasi dari upaya dimaksud adalah bahwa pengelola mampu memobilisasi kepala sekolah, guru, dan personel lain yang berkepentingan dengan sekolah, agar bekerja lebih baik. Pengalaman di New Zealand dan Brasil menunjukkan bahwa keseriusan pengelola dalam menangani desentralisasi telah membuahkan hasil yang meyakinkan.

Yang terjadi di Indonesia, desentralisasi yang dimulai tahun 2001 melimpahkan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten / kota. Dalam sektor pendidikan,

* Suharsimi Arikunto adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

perubahan yang mendasar terdapat pada penggabungan antara Kandep Kabupaten / kotamadya dengan Cabang Dinas P dan K. Semula antara dua lembaga tersebut terdapat pembagian tugas yang terpisah. Kandep Depdiknas mengerjakan tugas operasional kurikulum, yaitu bidang akademik atau edukatif, sedangkan Dinas P dan K mengerjakan urusan 3M, yaitu Man (personel), Money(keuangan) dan Material (sarana dan prasarana). Setelah desentralisasi, yang ada hanya satu kantor, yaitu Dinas Pendidikan.

Nama untuk kantor ini di masing-masing kabupaten / kota sangat bervariasi. Ada yang menyebut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada Dinas Pendidikan Nasional, ada Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan lain-lain, disebabkan antara lain karena cakupan obyek yang diurus oleh kantor yang bersangkutan. Dengan penyebutan nama itu, diharapkan dapat difahami urusan apa saja yang dikerjakan oleh kantor yang bersangkutan.

Setelah digabungkan menjadi satu kantor, semua tugas menjadi tanggungjawab lembaga gabungan tersebut. Personil yang menjabat di kantor gabungan ini, selain berasal dari dua kantor yang bergabung, juga ada yang berasal dari kantor lain, misalnya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi, bahkan ada juga beberapa orang hasil mutasi yang berasal dari kantor yang tidak menangani masalah pendidikan, antara lain kantor pemerintah daerah atau Bappeda, atau dinas lain. Diasumsikan bahwa dengan adanya penggabungan dua pekerjaan dan personil di dalamnya, terjadi gangguan kelancaran kerja, baik di dalam kantor itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan unit yang ada di bawahnya, yaitu di kecamatan. Diantara hubungan yang perlu mendapat perhatian adalah Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya, serta dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait di dalam lingkungan wilayah kabupaten/kota.

B. Proses Desentralisasi dari Waktu ke Waktu

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa desentralisasi dalam pendidikan dapat mengurangi tumpang-tindih urusan, dan atau keruwetan prosedur birokrasi, serta dapat memotivasi personil menjadi lebih produktif. Namun di samping yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif antara lain karena adanya 'kekuasaan' baru yang barangkali belum diantisipasi dan ditata sebelumnya. Dampak positif dapat dilihat dengan apa yang terjadi di Meksiko. Di negara tersebut, desentralisasi pendidikan dapat menghemat dana karena adanya pengurangan personil yang menduduki jabatan akibat ada perampingan. Demikian juga di Indonesia dengan penggabungan dua kantor pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Bagaimana dampak penggabungan, mutasi, dan pengurangan pejabat di dalam kantor menjadi objek dari analisis situasi ini.

Di Indonesia, desentralisasi pendidikan menyertai adanya kebijakan otonomi daerah. Ujicoba otonomi daerah sendiri sebetulnya sudah dilaksanakan pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1995 dengan cakupan 26 kabupaten/kota di Indonesia yang peresmian dilakukannya oleh Presiden Suharto di Istana Negara pada tanggal 25 April 1995. Ujicoba ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 45/1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik Berat pada Daerah Tingkat II, juncto Undang-undang No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Dengan ujicoba ini, pada mulanya pemerintah merencanakan untuk melakukan otonomi daerah secara bertahap. Ujicoba di 26 kabupaten dan kota itu rencananya akan dievaluasi terus-menerus. Berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi tersebut, diseminasi akan dilakukan terhadap kabupaten/kota lainnya sehingga dalam jangka waktu 10-15 tahun sebagian besar kabupaten/kota (saat ini ada sekitar 400 buah) telah melakukan otonomi daerah.

Pada bulan Juli 1997, badai krisis moneter mulai melanda Indonesia dan banyak negara Asia lainnya, terutama Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara negara-negara lain tersebut dengan cepat bangkit dari badai, Indonesia justru makin terpuruk. Pada tahun 1997, IMF datang untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, tapi pada saat itu krisis di Indonesia sudah terlanjur berat. Krisis moneter semakin meluas menjadi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis budaya, krisis moral, dan krisis kepercayaan luar negeri. Itulah sebabnya krisis tersebut lebih dikenal dengan krisis multi dimensi. Akhirnya, pada bulan Mei 1998 terjadi gerakan reformasi yang secara dramatis menjatuhkan pemerintahan Orde baru di bawah Presiden Suharto yang telah bertahan selama 32 tahun. Segala yang berbau Orde Baru dihujat habis, seakan-akan identik dengan kesalahan dan "dosa". Demonstrasi massa terjadi tanpa henti. Hampir tiada hari tanpa demo. Semangat pun menggebu-gebu untuk melakukan reformasi dalam segala bidang yang diduga menjadi biang penyakit selama ini. Salah satu di antaranya adalah sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik pada masa itu, diubah secara radikal menuju sistem yang super desentralistik.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, keluarlah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU ini disusul lagi dengan berbagai perangkat peraturan yang dilandasi semangat desentralisasi dan otonomi daerah, di antaranya adalah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, keluar PP No. 25/2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam PP inilah dirinci urusan-urusan yang ditangani oleh Pusat dan Provinsi. Uniknya PP ini ialah bahwa kewenangan kabupaten/kota yang justru merupakan sebagian besar urusan yang didesentralisasikan (diotonomi-daerahkan) tidak disebutkan secara khusus. Logika yang digunakan adalah bahwa apa yang bukan kewenangan Pusat dan Provinsi, tentunya otonomi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

C. Peran Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran Dinas pendidikan Kabupaten/Kota setelah desentralisasi pendidikan jelas berbeda dengan sebelumnya. Kalau dahulu yang berperan penting adalah Kantor Wilayah Diknas Provinsi, dan Kantor Diknas kabupaten/kota hanya merupakan perpanjangan tangan dari Kanwil Diknas tingkat Provinsi, yang kebijaksanaan kegiatannya banyak dituntun dari pusat, setelah desentralisasi kewenangan berpindah ke kabupaten/kota. Dengan demikian peran Diknas Kabupaten/kota menjadi bertambah besar. Tugas dan fungsi kantor ini sangat menentukan 'nasib' pendidikan yang ada di wilayahnya. Dengan tugas dan fungsi sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/kota adalah pengelola atau koordinator dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan.

Apabila dulu kebutuhan untuk pendidikan sekolah diajukan ke pusat melalui mekanisme pengusulan langsung, dalam era desentralisasi pendidikan, usulan seperti itu dilakukan melalui pemerintah daerah / Bappeda yang disetujui oleh DPRD. Apabila Dinas Pendidikan tidak pandai-pandai menyusun perencanaan yang operasional disertai rincian dana yang jelas dan rasional pula, mungkin sekali usulan ini tidak dimengerti oleh pihak pemerintah daerah dan DPRD. Akibatnya dapat ditebak, usulan seperti itu biasanya ditolak. Jika terjadi penolakan seperti itu, yang menanggung akibatnya adalah sekolah-sekolah. Untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, pengusulan kebutuhan dana pendidikan untuk semua sekolah dan kantor pendidikan harus dibuat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan handal. Dengan kata lain, personil di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus dipilih orang-orang yang memahami pendidikan.

Tulisan ini diharapkan dapat mendapatkan perhatian bersama untuk lebih mencermati kemampuan Diknas kabupaten/ kota sebagai agregat, serta personil-personil yang ada di dalamnya. Ikatan sarjana (dan pemerhati) Manajemen Pendidikan Indonesia pasti terpanggil untuk memperhatikannya. Jika selama ini perhatian masih lebih banyak ditujukan pada teknis operasional di sekolah-sekolah- bahkan tertuju pada lingkup yang sempit, yaitu proses belajar- mengajar- kini sudah waktunya meluaskan cakrawala pemikiran pada lingkup yang lebih luas yang tidak lepas dari dan justru merupakan muara keberhasilan, yaitu Kantor Diknas Kabupaten/ kota berhasil memperjuangkan.

D. Objek Analisis Situasi

Objek utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis situasi ini dapat dirinci dalam dua hal, yaitu (1) kapasitas lembaga itu sendiri dan (2) fungsi-fungsi yang dikerjakan.

1. Kapasitas Lembaga

Dalam analisis situasi ini kapasitas meliputi 3 (tiga) tingkat yaitu (a) regulatory framework, (b) organisasi, sistem dan prosedur, (c) SDM.

a. Peraturan-peraturan pendukung (Regulatory framework) :

Banyak hal yang perlu dikaji dalam analisis situasi yang berkenaan dengan regulatory framework. Kebijakan otonomi daerah yang beruntun dengan desentralisasi pendidikan didukung dengan beberapa peraturan, diantaranya :

- a. Dasar PP No. 22/1999 dan 25, UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999, sejauh mana produk-produk tersebut sudah difahami oleh aparat di daerah, serta bagaimana keterlaksanaan, hambatan dan pendapat pelaksana sebagai bahan penyempurnaan.
- b. Keterkaitan Perda dengan SK Bupati yang berkaitan dengan upaya dan kegiatan pendidikan, sejauh mana mendukung Dinas Diknas Kabupaten/ Kota dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan.
- c. SPM tahun 1999- yang sudah disosialisasikan ke daerah, sejauh mana sudah difahami, bagian mana dari butir-butir yang ada dapat diterima dan bagian mana ditolak, dengan usulan yang bagaimana.
- d. Sejahter mana SPM yang sudah ditentukan dari pusat dapat dipadukan dengan Perda, apakah ada kebingungan, ketidakcocokan antara kedua ketentuan tersebut.
- e. Apa yang dijadikan dasar pertimbangan bagi penyusunan kewenangan daerah yang diajukan ke pusat untuk diusulkan berlaku bagi daerah tertentu; apakah SPM yang ada dapat menimbulkan pertentangan atau friksi kekuasaan dana atau kewenangan di daerah.
- f. Sejahter mana SPM sudah dapat difahami oleh setiap aparat pelaksana dan sejauh mana dapat diaplikasikan; jika sudah ada pengalaman, apa saja hambatannya.
- g. Seberapa tinggi komisi E di DPRD memiliki pemahaman terhadap masalah pendidikan, seberapa tinggi telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan, apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan.

b. Organisasi, Sistem, dan Prosedur

Dengan adanya penggabungan antara Kandep Diknas dengan Cabang Dinas P dan K menjadi satu dengan nama "Dinas Pendidikan Nasional", selain dari tinjauan regulatory Framework, juga dapat ditinjau dari tiga aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu (1) organisasi, (2) sistem, dan (3) prosedur.

Tinjauan yang berkenaan dengan organisasi, sistem, dan prosedur sebagai berikut:

- a. Sejahter mana dan apa dampak positif dan negatif yang terlihat dan atau dirasakan dari adanya penggabungan dua instansi, yaitu Kantor Cabang Dinas dan Kantor Depdiknas

tingkat kabupaten/ kota. Urusan apa yang menjadi lebih lambat dan apa yang menjadi lebih lancar, serta apa yang menjadi penyebabnya. Dengan kata lain, apakah sekolah merasakan dampak positif dari negatif dengan adanya penggabungan ini dua instansi dibandingkan ketika masih terpisah.

- b. Bagaimana bentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan; apa ada kemungkinan mengubah struktur yang sudah ada agar menjadi lebih efektif. Alternatif dimaksud misalnya bukan pemisahan Subdin menurut jenjang sekolah tetapi menurut objek yang digarap, yaitu Subdin Kurikulum, Subdin Tenaga Pendidikan. Serta Subdin Sarana dan Prasarana. Dengan susunan Subdin seperti ini dimungkinkan adanya penghematan dan pengatasan masalah secara horisontal. Kekurangan guru dan sarana pada jenjang pendidikan tertentu dapat diatasi dengan cara ini, karena penugasan guru tidak terikat pada salah satu jenjang saja tetapi dapat merangkap di beberapa jenjang. Guru Matematika di SMP dapat mengajar di SD atau SMA. Kekurangan atau kelebihan alat di suatu jenjang, dapat diatasi dengan menalihkan ke jenjang yang lain.
- c. Apakah setiap unit yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah memiliki Pedoman Tugas dan Fungsi (Tupoksi) secara jelas, rinci, dan lengkap. Apakah setiap personil yang ada di kantor dinas pendidikan kabupaten/ kota memahami setiap butir tupoksi yang menjadi panduan kerja sehari-hari. Dari pengalaman survai di beberapa kabupaten/ kota diperoleh temuan yang menarik. Aparat kurang memahami tupoksinya, dan tidak peduli bahwa ada butir-butir isi yang harus dikaitkan dengan tupoksi unit lain.
- d. Apakah masing-masing unit yang ada di dinas pendidikan kabupaten/kota memahami adanya butir tupoksi yang sifatnya saling terkait dengan unit lain sehingga dalam melaksanakan tupoksi tersebut memaksa ada kerjasama antar unit, misalnya seksi kurikulum harus bekerja dengan seksi sarana prasarana karena pembelajaran membutuhkan pendukung peralatan yang relevan, serta kerjasama dengan seksi tenaga pendidikan sehubungan dengan penyiapan guru yang harus melaksanakan proses pembelajaran agar tertangani oleh guru dengan latar belakang pendidikan yang tepat.
- e. Apa ada hambatan atau kesulitan terutama menyangkut penanganan operasional pendidikan di sekolah, misalnya masalah permintaan alat pelajaran dan distribusi buku sumber belajar, apakah sudah lancar atau belum, kalau belum apa bentuk kesulitannya dan apa penyebabnya.
- f. Apakah masyarakat memahami adanya penggabungan dan (apabila ada urusan, misalnya dalam menawarkan buku sumber dan lain-lain), apakah terasa semakin lancar atau lamban jika dibandingkan dengan sebelum desentralisasi.

- g. Apakah ada semacam OMU dengan dinas-dinas lain dalam pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan mutu kinerja pendidikan. Sebagai misal, apakah Bappeda memberi kesempatan melalui dana hibah yang dikompetisikan kepada sekolah agar tercipta persaingan secara sehat demi peningkatan mutu pendidikan.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota merupakan penggabungan dari Kantor Departemen Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan Nasional) dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Departemen Dalam Negeri). Personil yang menduduki jabatan struktural di kantor itu berasal dari kedua kantor yang bergabung, ditambah dengan dari kantor-kantor lain.

Analisis situasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Dari mana saja personil yang menduduki posisi kepala unit atau sub unit yang ada dalam struktur organisasi.
- b. Bagaimana kesesuaian antara tugas dan fungsi yang harus diemban dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
- c. Sudah adakah upaya untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi mereka, jika sudah ada bagaimana caranya, dan dengan instrumen seperti apa. Dengan kata lain. Apakah sudah ada keserasian latar belakang kemampuan aparat dengan tugas yang diemban. Apabila ada kurang-serasian, apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personil, dan apa hambatannya.
- d. Sudah adakah upaya untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas kerja sesuai dengan tuntutan reformasi, dan otonomi daerah, atau dengan kata lain, sudahkah mereka diarahkan pada pencapaian prinsip "*good governance*".

2. Kapasitas Fungsi-Fungsi yang Dikerjakan

a. Fungsi Perencanaan

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, fungsi perencanaan menjadi sangat penting. Kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota untuk menyusun Renstra Dinas serta memperjuangkan ke Pemda, Bappeda, dan DPRD, sangat menentukan nasib pendidikan di daerahnya. Hambatan dari suksesnya perjuangan Kepala Dinas Pendidikan, biasanya terletak pada pemahaman pihak-pihak lain terhadap inti persoalan yang ada dalam kegiatan pendidikan.

Dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain di suatu kabupaten/kota, memang; Dinas Pendidikan Nasional kelihatan yang paling besar. Personil guru dan pegawai lainnya, rata-rata kurang-lebih 50% dari seluruh personil yang ada di kabupaten/kota. Demikian dana yang dibutuhkan, terutama untuk gaji guru saja, sudah menyedot kira-kira separo dari APBD. Jadi tidaklah mengherankan

kalau dinas-dinas lain merasa iri dan mengira bahwa kepentingan dinas mereka dikalahkan oleh dinas pendidikan.

Analisis situasi yang berkenaan dengan fungsi perencanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah Renstra yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten/kota tidak menyimpang dari Propeda, ruang lingkupnya lengkap dan seimbang antara urusan persekolahan dengan luar sekolah, pemuda dan olahraga (mungkin juga Kebudayaan?).
- b. Apakah substansi perencanaan tidak menyimpang dan sudah selaras dengan ketentuan yang ada/ disebutkan dalam SPM- dalam arti tidak melanggar kewenangan yang dimiliki.
- c. Apakah aparat sudah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pembentukan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah. Perencanaan disusun dengan melibatkan pihak-pihak lain, antara lain stakeholder dan Dewan Pendidikan.
- d. Apakah dalam fungsi perencanaan terlihat dan dimungkinkan adanya transparansi dan daya tanggap dari lingkungan. Terlihat adanya kesetaraan antar berbagai aspek, misalnya antar gender, antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
- e. Apakah sudah terkandung akuntabilitas Dinas sebagai aparat yang profesional. Apakah dalam renstra tergambar atau menunjukkan kerja yang efektif dan efisien.
- f. Adakah atau sejauh mana Renstra sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bidang Kesiswaan

- a. Sejauh mana aparat memahami tentang status APK, APM dan indeks-indeks lain yang berkenaan dengan status keterlibatan siswa dalam pendidikan sesuai SPM yang berlaku, apa saja yang sudah dilakukan oleh aparat untuk mengetahui penyebab
- b. Dalam penanganan sekolah terhadap siswa, apakah aparat memahami gerak upaya yang dilakukan oleh sekolah, dan sejauh mana aparat telah memberikan bimbingan dan pemantauan, sehingga orangtua siswa merasa puas menyerahkan anaknya ke sekolah?
- c. Apakah aparat Dinas Pendidikan memahami tentang bagaimana mencapai keunggulan siswa di wilayahnya, dan apakah upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keunggulan itu.

c. Bidang Ketenagaan

- a. Sejauh mana aparat di Dinas Pendidikan – Bagian Kepegawaian memiliki pemahaman tentang variasi status personil di wilayahnya.
- b. Bagaimana aparat menyusun rencana penerimaan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sejauh mana aparat Bagian Kepegawaian/ Seksi Tenaga memperlakukan personil berkenaan dengan penempatan, pembinaan, pemberian insentif, mengurus promosi, dan mengurus pemutusan hubungan kerja.

- d. Bagaimana aparat memperhatikan kesejahteraan personil administrasi dan personil teknis edukatif.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Sejauh mana pemahaman aparat tentang kepemilikan jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan di kantor-kantor pendidikan yang ada di wilayahnya.
- b. Apakah aparat memiliki peta kondisi sarana yang ada, misalnya yang terkait dengan kerusakan gedung sekolah, perabot/mebiler, dan alat-alat pelajaran, serta apakah ada upaya untuk membuat peta kondisi tersebut.
- c. Apakah ada upaya dari aparat di Dinas Pendidikan untuk melakukan antisipasi tentang penghematan sarana pendidikan melalui pendekatan penjagaan (*preventive approach*), yaitu melakukan perawatan secara akurat daripada merehab sesudah rusak?

e. Pendanaan

- a. Sejauh mana aparat sudah memahami Undang-undang dan peraturan tentang pendanaan dalam UU Nomor 25/ 1999 dan PP 25 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002?.
- b. Sejauh mana aparat sudah memberikan bimbingan tentang pendanaan dan penganggaran terhadap sekolah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga (juga kebudayaan). Apakah ada dana yang dialokasikan sebagai bantuan operasional untuk bidang-bidang tersebut.
- c. Apakah penerapan tidak menyimpang dari ketentuan, apakah ada bukti yang dapat dilihat dari dokumen sebagai bukti pemasukan dan penggunaan dana? Sejauh mana dan bagaimana menjaga transparansi dalam penggunaan dana yang dialokasikan di Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota?
- d. Bagaimana keberesan pertanggungjawaban pendanaan dalam arti kesesuaian penggunaan dengan ketentuan. Apa yang dilakukan oleh aparat sehubungan dengan audit keuangan berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Apakah aparat yang menangani dana pendidikan perlu mendapatkan pelatihan, dan jika perlu mengenai apa saja agar tidak ketinggalan dari kebijakan yang berlaku, serta untuk mengantisipasi datangnya SK atau peraturan baru tentang pendanaan.

f. Supervisi dan Akreditasi

- a. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/kota masih menganggap penting adanya pengawas (untuk persekolahan) dan penilik (untuk luar sekolah) dan apa alasan yang ada di balik penting atau tidak pentingnya fungsi tersebut
- b. Jika masih ada pengawas dan penilik, apakah Dinas Pendidikan telah mengupayakan agar personel yang melakukan supervisi sudah tepat sesuai dengan persyaratan?

- c. Apakah aparat mempunyai bukti bahwa mereka memikirkan tentang peningkatan profesionalitas supervisor?
- d. Apakah aparat mengetahui (dengan bukti dokumen) bagaimana upaya sinkronisasi kepengawasan antara pengawas dengan kepala sekolah yang juga bertugas sebagai supervisor.
- e. Apakah instrumen yang digunakan untuk supervisi masih instrumen lama yang disusun oleh pusat dan sudah diberlakukan bertahun-tahun ketika masih berlaku sentralisasi pendidikan.
- f. Dengan adanya kewenangan di daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, apakah terpikir oleh aparat dinas pendidikan untuk menyempurnakan instrumen ini?
- g. Apakah laporan yang disusun oleh pengawas sekolah (dan Penilik) ada yang meneliti/memeriksa/ mencermati, sehingga pengawas tahu kekurangannya dan ada upaya untuk meningkatkan kinerjanya.
- h. Apakah data yang diperoleh pengawas tentang kinerja guru juga sudah dimasukkan dalam LAKIP Dinas dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam menentukan mutasi guru atau pertunjukan menjadi kepala sekolah?

E. Penutup

Tulisan ini terutama dimaksudkan untuk lebih mencermati kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setelah dilaksanakannya otonomi daerah. Peran Diknas Kabupaten/kota menjadi bertambah besar. Tugas dan fungsi kantor ini sangat menentukan 'nasib' pendidikan yang ada di wilayahnya. Dengan tugas dan fungsi sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan secara langsung, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/kota adalah pengelola atau koordinator dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.